

Fitnah Keji Aktivis Khilafah Terhadap Toleransi di Indonesia

written by Harakatuna



Harakatuna.com - Hari ini aktivis khilafah menuding sebagian ustaz dan umat Islam tidak layak diberi panggung karena dianggap sudah terpapar sekularisme dan liberalisme. Bahkan aktivis ini menuding ada pihak-pihak yang memberi jalan terhadap non-muslim untuk beribadah adalah sesuatu yang keablasan.

Mereka bilang, hal itu adalah praktik toleransi yang keablasan. Mirisnya, sikap jemawa dan klaim kesewenang-wenangan ini terjadi atas dasar landasan paham agama. Padahal jika dicermati, hal tersebut menunjukkan sebuah ketidaktahuan dalam agama.

Mereka mengatakan ini adalah toleransi keablasan karena umat Islam dan pemerintah dipandang selalu menyerang paham radikal tetapi memberi akses kepada non-muslim. Menurut aktivis khilafah ini, sejatinya umat Islam dan pemerintah telah mencederai hal yang selama ini digaung-gaungkan, yaitu syariat Islam. Mereka merasa bahwa umat Islam sedang berjalan ke jalan yang salah, utamanya Kemenag RI.

Sebab, toleransi dianggap telah dijadikan sebagai politik sekelompok orang untuk melakukan hal-hal yang dianggap bermanfaat pada dirinya. Aktivis khilafah mengira, kata toleransi mereka definisikan sesuai kepentingan kelompok dan golongan.

Aktivis khilafah selalu memberikan contoh tentang toleransi keablasan ini. Katanya, mereka yang tidak sejalan disebut radikal dan intoleran. Misalnya, jika

mereka memberikan pengajian di suatu tempat, selalu dipermasalahkan atau dibubarkan. Sedangkan non-muslim malah dijaga dan diberi kelonggaran.

Aktivis khilafah menulis dalam *Meredefinisi Makna Toleransi*: “Wajar jika sikap mereka mengundang berbagai respons negatif dari masyarakat banyak. Terlebih ketika makna toleransi mereka tunjukkan dengan keikhlasan menjaga gereja dan kebaktian. Mereka pun tidak sungkan menjaga dan berjoget ria di acara-acara dangdut. Alhasil sikap toleran yang mereka maksudkan hanya berlaku untuk mereka yang tidak seiman. Sementara itu, dengan sesama mukmin, sikap mereka selalu keras dan berlawanan.”

Aktivis khilafah menulis ini sejatinya tidak muncul di ruang kosong. Mereka mencurigai bahwa sikap anti khilafah dan mengatakan toleransi kebablasan ini adalah salah satu politik yang dipesan oleh pihak-pihak Barat.

Bagi mereka, toleransi kebablasan ini dan moderasi berjalan seiring dengan proyek penjajahan politik dan ekonomi oleh negara-negara besar. Menurut mereka, atas nama globalisasi dan liberalisasi pasar, mereka menyeret paksa negeri-negeri Islam untuk membuka lebar akses atas semua sumber daya. Misalnya seperti ekonomi dan politik di Indonesia.

Mereka katakan bahwa yang dimaksud muslim moderat atau moderasi di sini adalah muslim dan ajaran yang ramah alias toleran terhadap nilai-nilai Barat, seperti nilai-nilai sekularisme, liberalisme, pluralisme, demokrasi, kesetaraan gender, dan sejenisnya. Kata mereka, ini terbukti sengaja dipraktikkan di Indonesia.

Mereka menuduh Indonesia adalah salah satu negara yang mengemban tugas di atas. Sebab menurut mereka, hanya Indonesialah yang gencar menargetkan agar umat Islam jauh dari gagasan-gagasan yang berlawanan dengan nilai-nilai Barat, terutama gagasan Islam ideologis yang menuntut penerapan syariat Islam kaffah dalam bingkai negara Khilafah Islam.

“Mereka dalam hal ini tidak menargetkan penghapusan syariat Islam. Cukuplah ajarannya dimoderasi sehingga umat Islam tetap merasa berislam, tetapi cara berpikir dan bersikapnya mengadopsi pemikiran dan perilaku yang menguntungkan penjajahan Barat. Pengarusan gagasan moderasi Islam ini masif dilakukan di seluruh dunia Islam. Berbagai pihak digandeng erat untuk menyukseskan proyek kolosal ini, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan,

intelektual, ulama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi massa hingga media massa," tulis aktivis khilafah.

Pembaca Harakatuna pasti merasa bahwa tuduhan di atas adalah sikap yang keji dan jauh dari kebenaran. Sebab, apa yang diperjuangkan oleh para ulama, kiai, ormas, dan lembaga negara adalah tuntutan agama yang berporos pada nilai-nilai agama yang moderat, toleran, dan keadilan. Ini dilakukan karena masyarakat Indonesia harus mulia, mandiri, berdaulat, dan memberikan rasa kedamaian kepada seluruh alam semesta.